



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 924/II/IX/2016

**DPR RI Secara Aklamasi Setujui
Budi Gunawan Kepala BIN**

**Ade Komarudin Ajak Pers
Bersama-sama
Perbaiki Citra DPR RI**

**Komisi IX DPR RI Setuju
Ratifikasi MLC
untuk Lindungi Pelaut**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almsyhari berbincang dengan calon Kepala BIN Budi Gunawan usai rapat fit and proper test

DPR RI Secara Aklamasi Setujui Budi Gunawan Kepala BIN

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Taufik Kurniawan, Kamis (8/9) secara aklamasi menyetujui Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutyoso. Persetujuan disampaikan DPR RI setelah mendengar laporan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almsyhari tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (7/9).

“Apakah laporan Komisi I tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN dapat disetujui? Tanya Taufik yang dijawab serempak "Setuju" oleh peserta Rapat. Menurut Taufik yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, hasil Rapat Paripurna akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam laporannya Ketua Komisi I Abdul Kharis menyatakan bahwa Komisi I DPR RI telah memutuskan bahwa Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala BIN. Kesimpulan itu diambil setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN dilangsungkan oleh Komisi I pada Rabu (7/9). Setelah pemaparan visi secara terbuka dan pendalaman tertutup, Komisi I mengambil keputusan.

"Komisi I memutuskan memberikan pertimbangan, saudara Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala Badan Intelijen

Negara menggantikan Sutyoso," kata politisi PKS Dapil Jateng tersebut.

Perjalanan mantan Wakapolri menjadi Kepala BIN ini terbilang cepat dan mulus sebab surat pemberitahuan dari Presiden ke Pimpinan DPR RI dilakukan pada Jumat (2/9) dan persetujuan diberikan pada Rapat Paripurna Kamis (7/9).

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada calon kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Budi Gunawan dengan kepala BIN terdahulu.

"Prosesnya sama seperti yang sudah-sudah, namun yang harus diingat DPR RI tidak dalam rangka menyetujui atau tidak. Melainkan hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden. Hal ini pun yang terjadi dengan Panglima TNI," terang TB Hasanuddin. ■

Pimpinan DPR RI Terima Pertimbangan DPD Terkait Calon Anggota BPK

Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengapresiasi kunjungan Pimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, beserta Pimpinan Komite 4 DPD RI, sekaligus menerima pertimbangan terkait calon anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal tersebut berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR RI, Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9).

“ Hal seperti ini adalah hal yang baik di mana, dalam undang-undang DPR RI dalam beberapa hal menerima pertimbangan dari DPD. Untuk itu saya memberikan apresiasi. Lebih lanjut silaturahmi seperti ini sangat baik bagi hubungan antar kedua lembaga negara untuk mencari berbagai solusi yang ada. Karena terkadang faktor komunikasi menjadi ganjalan, dan hal yang langka di antara pejabat negara. Oleh karena itu sekali lagi saya menyambut baik dan mengapresiasi tradisi baru ini,” ungkap Ketua DPR RI, Ade Komarudin.

Pada kesempatan itu Akom, biasa Ade Komarudin disapa, mempersilahkan Pimpinan DPD menyerahkan berbagai pertimbangannya terkait dengan calon anggota BPK. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan pertimbangan tersebut ke komisi terkait di DPR RI, yakni Komisi XI yang notabene merupakan



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima hasil pertimbangan calon Anggota BPK dari Pimpinan DPD

mitra kerja dari BPK.

Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti surat dari pimpinan DPR RI tanggal 8 Agustus 2016 terkait pertimbangan terhadap calon anggota BPK. Dan selama tiga hari penuh Komite 4 menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 24 nama calon anggota BPK yang diterimanya.

Kedua puluh empat nama tersebut sejatinya lolos dalam tes maupun

wawancara yang dilakukan Komite 4 DPD RI itu. Namun pihaknya memberikan delapan nama calon yang paling layak untuk diprioritaskan berdasarkan ranking atau peringkat nilai dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut adalah Anggito Abimanyu, Indra Bastian, Tugabus Haryono, Emita Wahyuastami, Ahmad Yani, Bahrullah Akbar, Johannes Widodo Haryo Mumpuni, Muhammad Yusuf Fateh. ■

(Ayu), foto: jktu.nugrahadr.

BULETIN
PARLEMETARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL** **KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) [ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Pemotongan Anggaran Domain Pemerintah

Terkait penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan hal tersebut merupakan domain Pemerintah.

“Terkait dengan Inpres pemotongan anggaran, itu merupakan domain pemerintah” tegas Taufik usai memimpin Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9).

Diketahui, Inpres yang diterbitkan Presiden Jokowi itu, mencantumkan sebanyak 83 Kementerian dan Lembaga yang diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan APBN-P 2016. Namun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan tiga lembaga di Parlemen, yakni MPR, DPR RI, dan DPD tidak dicantumkan dalam Inpres tersebut.

Menanggapi hal itu, Taufik menuturkan, DPR RI tidak mengajukan permintaan apapun terkait penghematan anggaran. Meskipun, pembahasan APBN-P 2016



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

merupakan keputusan bersama DPR RI dan Pemerintah. Namun, penerbitan Inpres per tanggal 26 Agustus 2016 itu, merupakan kewenangan pemerintah sepenuhnya.

"Berkaitan dengan adanya Inpres pelaksanaan APBN-P 2016, DPR RI tidak dalam kapasitas meminta ataupun mendorong," tuturnya.

Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan pemotongan anggaran adalah domain pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Hal itu bisa dilakukan, sepanjang tidak mengubah asumsi makro di dalam APBN-P 2016 yang telah disetujui antara DPR RI dan Pemerintah.

"Dalam hal ini DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah melakukan adjustment untuk melakukan efisiensi anggaran yang secara garis besar adalah *adjustment* teknis, tidak terkait asumsi-asumsi makro yang lain," imbuh politisi dari dapil Jawa Tengah itu. ■

(anna.mpr), foto: kreano/br

Komnas Perempuan Usulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dibahas Pansus

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima kunjungan Komnas Perempuan membicarakan tindak lanjut dari pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Selasa, (6/9) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Fahri menjelaskan bahwa sejauh ini kejahatan seksual bersumber pada kompleksitas dunia modern dengan penggunaan teknologi yang tidak terkendali. "Arus media sosial dan globalisasi membuat masyarakat kita terjadi perubahan nilai dengan cepat. Di dalamnya ada industri pornografi yang membuat orang rasional berbicara seksualitas Kita harus membuat UU yang antisipatif terhadap



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

air bah yang besar ini agar generasi kita terselamatkan," jelasnya.

Mengenai usulan Komnas Perempuan agar RUU ini dibahas ditingkat Pansus, Fahri menjelaskan bahwa usulan itu akan ditindaklanjuti dengan Badan Legislasi (Baleg)

DPR RI. "Teman-teman ini mengusulkan agar RUU ini dapat dibahas di tingkat

Pansus, supaya lebih komprehensif pengkajiannya. Jadi tidak saja di komisi hukum karena ada kaitannya dengan hukum atau komisi yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan anak," katanya,

"Saya akan mengecek pada Baleg sudah sejauh mana RUU ini, nanti kalau sudah ada penjelasan tinggal diusulkan agar dibentuk pansus," sambung Fahri.

Selain itu Fahri juga menjelaskan bahwa jika RUU ini dibahas lebih cepat akan semakin baik. "Saya setuju jika konsepsinya sudah matang, tinggal kita perjuangkan agar RUU ini bisa dibahas lebih cepat karena memang kita memerlukan RUU ini agar dapat diundangkan lebih cepat," tuturnya.

Lalu mengenai sanksi yang akan ditegaskan dalam RUU ini, Fahri menilai bahwa hal itu perlu dirumuskan agar dapat memberikan efek jera terhadap tindak pelaku kejahatan. "Ya termasuk sanksi agar dibuat *sekomprehensif* mungkin agar dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat," pungkasnya. ■

(hs.mpr) foto: arif_tin.paula/br

Ade Komarudin Ajak Pers Bersama-sama Perbaiki Citra DPR RI

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak kalangan pers untuk bersama-sama memperbaiki citra DPR RI. Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPR RI harus dijaga dengan baik. Demikian diungkapkan dalam acara *Meet the Press* "Parlemen dan Media Membangun Pemerintahan Demokratis: Politik Alokasi Anggaran dan Pengangkatan Jabatan Publik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (2/9).

“ Yang salah katakan salah, sedangkan yang bagus harus diungkap dengan bagus pula sehingga berimbang. Kalau menutup-nutupi, saya kira juga tidak baik. Kita harus jujur pada diri sendiri, pada keadaan, agar demokrasi di negara ini makin sehat," kata Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Dijelaskannya, parlemen memiliki peran penting terhadap sistem demokrasi. Di sisi lain, media juga turut berperan dalam membangun demokrasi kontemporer saat ini, termasuk di Indonesia. Untuk itu, hal tersebut perlu diikuti dengan pemberitaan yang berimbang.

Diskusi yang berlangsung hangat ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, Ketua Komisi XI Melcias Markus Mekeng, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, dan Pemimpin Redaksi Media Cetak, TV dan Radio, serta Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada kesempatan ini, Akom membeberkan fungsi-fungsi DPR RI yakni, fungsi pengawasan, legislasi, anggaran dan diplomasi. Di bidang legislasi, dia mengakui, masyarakat lebih menuntut pada aspek kuantitas. Akibatnya, jika target prolegnas tidak tercapai, maka DPR RI dianggap tidak bekerja. "Pokoknya kalau tidak tercapai



Suasana Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan beberapa Pimpinan Redaksi

target prolegnas, DPR RI tidak kerja. Padahal, target prolegnas terus ditambah mengikuti perkembangan," jelasnya.

Padahal lanjutnya, hukum selalu dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman, bukan mendahului. Sehingga urgensi menjadi salah satu faktor terpenting dalam penyusunan undang-undang.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, DPR RI tidak perlu banyak membuat UU, yang penting kualitas. "Kemarin lebih tegas lagi pada pertemuan HIPMI, beliau mengatakan cukup 5 UU sajalah pertahun jangan banyak-banyak," terang Akom.

Berkenaan dengan fungsi anggaran, Akom berkeinginan membentuk suatu sistem *clean and good governance*. "Saya bertemu Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, kami mempunyai kesamaan untuk membuat sistem pembahasan anggaran yang merujuk pada *clean and good governance*, dan keluar dari pembahasan anggaran pada *grey area*," tutur politisi dapil Jawa Barat itu.

Sedangkan terkait dengan pengawasan,

Akom mengatakan bahwa semua anggota DPR RI sebagai perwakilan rakyat mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya. Jadi, jika terjadi perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah.

Kepada kalangan pers, Akom berharap, interaksi yang terbangun dalam pertemuan tersebut menjadi perhatian bersama dalam

melanjutkan komitmen DPR RI menuju parlemen modern yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi pernyataan itu, Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menyambut baik acara yang digelar DPR RI ini sebab sudah lama ditunggu kalangan pers. Acara serupa digelar dua tahun lalu dan baru kali ini diadakan kembali.

Menurut Suryopratomo, peran DPR RI dan Pers itu hampir sama yaitu melakukan kontrol kepada pemerintah. Sedangkan inti yang ingin dicapai dalam pertemuan ini adalah bagaimana penguatan sistem demokrasi. " Kita mempunyai keinginan bahwa pemerintah siapa pun itu, selalu bisa membawa Indonesia lebih baik. Supaya tujuan itu tercapai, saya kira fungsi pengawasan menjadi penting. Di sinilah peran DPR RI sebagai bagian upaya kita membangun sistem demokrasi," tambah Ketua Forum Pemred menegaskan. ■

Paripurna DPR RI Setujui Tiga Nama Calon Hakim Agung

Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui tiga nama calon hakim agung di ruang Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

“ Berdasarkan pendapat dan pandangan Fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap tiga (3) calon Hakim Agung, yakni Panji Widagdo untuk calon Hakim Agung Kamar Peradilan Perdata, Ibrahim untuk calon Hakim Agung Kamar Peradilan Perdata, dan Edi Riadi untuk calon Hakim Agung Kamar Peradilan Agama,” ujar Wakil ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman dalam laporan yang dibacakannya di sidang paripurna.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menyerahkan nama calon Hakim Agung kepada Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Ketiga calon hakim agung terpilih tersebut, lanjut Benny telah melalui berbagai rangkaian Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan yang merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antar lembaga negara. Sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan itu berlangsung pun, Komisi III telah melakukan

tahapan lainnya seperti pengumuman nama lima calon Hakim Agung dan dua calon hakim Ad Hoc Tipikor di MA pada surat kabar nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

"Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas dan moral calon hakim agung merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan lembaga peradilan yang akuntabel dan berwibawa. Karena itu, dalam melaksanakan uji

kelayakan, Komisi III DPR RI mengutamakan kualitas calon hakim agung yang meliputi integritas, visi dan misi, serta kompetensi," paparnya.

Sebelumnya, selain tiga nama calon hakim terpilih tersebut, terdapat empat nama lainnya yang diajukan Komisi Yudisial dalam Surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, dan Pimpinan Komisi III DPR RI dengan surat No. 190/PIM/RH.01.08/6/2016 tertanggal 29 Juni 2016, perihal Usulan nama calon hakim agung tahun 2016, dan Surat No.191/PIM/RH.04/6/2016

tertanggal 29 Juni 2016 perihal usulan nama calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA tahun 2016. Serta surat Ketua DPR RI terhadap hasil keputusam rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI No. PW/12379/DPR RI/ VII/ 2016 tertanggal 28 Juli 2016, dimana telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA. ■

(Ayu) foto: Rantih

Pimpinan DPR RI Terima Surat Penggantian Kepala BIN

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua Korinbang Agus Hermanto dan Wakil Ketua Korekku Taufik Kurniawan menerima Mensesneg Pratikno, yang menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo tentang usulan untuk penggantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

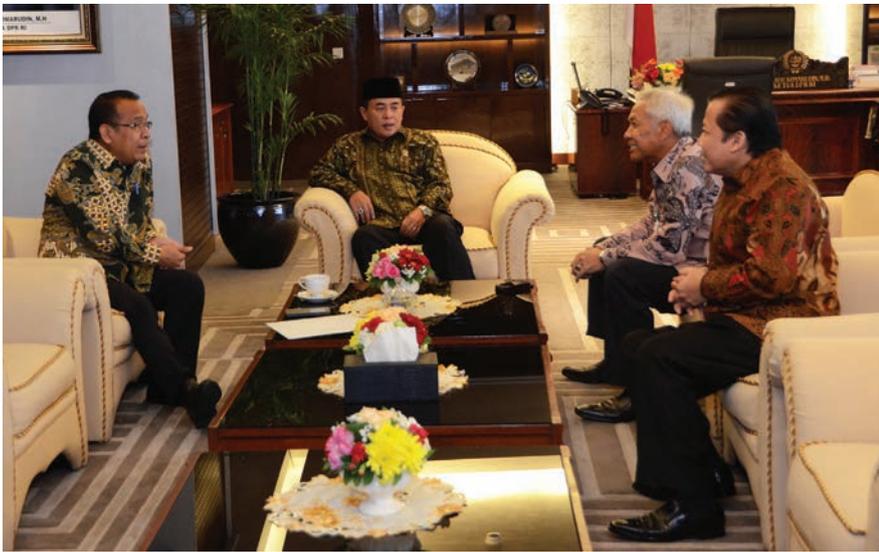
“ Hari ini saya telah menerima suratnya dari Mensesneg, dan kita akan segera mengadakan rapim untuk menentukan jadwal, guna menindaklanjuti hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Ade Komarudin saat konferensi pers

di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/9).

Ia juga mengatakan, rencananya hal tersebut akan ditindaklanjuti pada pekan depan, tetapi dengan mengadakan rapat terlebih dahulu bersama fraksi-fraksi.

"Hari Senin kita akan tentukan pada saat rapat dengan Pimpinan Fraksi, dan menugaskan kepada Alat Kelengkapan yang sesuai dengan mitranya yakni Komisi I," ucapnya.

Pimpinan DPR RI akan menugaskan Komisi I untuk mengatur



Pimpinan DPR RI menerima Mensesneg Pratikno

jadwal guna mengadakan *fit and propret test* kepada nama calon yang diusulkan dalam surat tersebut yakni

Budi Gunawan, setelah itu akan ditentukan jadwal pada rapat paripurna.

"Kita tidak ingin menunda surat dari Presiden, kita akan segera tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas pria yang akrab disapa Akom itu. Menurut Akom, anggota Dewan dan semua fraksi yang ada di DPR RI, punya komunikasi yang baik dengan Budi Gunawan, diperkirakan hal ini akan berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait alasan penggantian tersebut, dikatakan Mensesneg bahwa hal ini semata-mata sebagai regenerasi biasa. Pergantian Kepala BIN yang tergolong cepat ini juga ditanggapinya dengan menyatakan tidak ada perodesasi yang tegas tentang Kepala BIN. Pemilihan nama yang diusulkan, dikarenakan ada pertimbangan tertentu yang tidak bisa dijelaskannya kepada publik. ■

(dey.mp) Foto: Juba/mr

DPR RI Komit Melestarikan Seni Budaya Wayang

Wayang merupakan warisan luhur bangsa nusantara yang telah diakui oleh UNESCO. Sebagai mahakarya nenek moyang yang mengandung nilai seni tinggi dan membawa pesan moral yang bijak, Ketua DPR RI Ade Komarudin berkomitmen untuk memperhatikan dengan baik kelestarian seni budaya ini.

“ Kami komit memperjuangkan dunia wayang Indonesia. Ini adalah warisan dari para leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Saya sebagai orang Sunda pernah menikmati dengan baik dunia pewayangan ini semenjak kecil, jadi saya paham dengan wayang ini,” jelas Ketua DPR RI di Lapangan DPR RI, Jakarta, saat memberi sambutan, Sabtu (3/9) malam.

Melalui Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI akan memperjuangkan aspirasi para dalang yang telah mendedikasikan dirinya dalam pelestarian seni budaya wayang.

"Juga nanti Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, akan kami mintakan memperjuangkan dengan baik aspirasi dunia pewayangan," ungkap Akom.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Dalam pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh DPR RI, untuk memeriahkan HUT RI dan DPR RI ke-71 kali ini mengangkat cerita "Dosomuko Pejah". Dengan dalang Dadan Sunandar Sunarya dan Wawan Dede Among. Dosomuko adalah nama lain dari Rahwana

raja negara Alengka.

Diceritakan bahwa sosok Rahwana merupakan pemimpin yang tidak mau menuruti kepentingan masyarakat dan hanya mementingkan diri sendiri.

"Ini ingin menjadi sebuah pelajaran agar tidak menuduh seseorang, dan membenarkan diri sendiri, tapi untuk mengingatkan agar jangan sampai angkara murka tumbuh dan melenyapkan negeri itu sendiri," kata ketua panitia acara dari Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin dalam sambutan.

Dalam acara ini hadir Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany, Duta Besar negara-negara sahabat. Tontonan ini juga disaksikan oleh masyarakat umum. ■

(eko) foto: Kresna/hr

Baznas Jangan Monopoli Pengelolaan Zakat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah meminta agar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) jangan memonopoli pengelolaan zakat. Baznas cukup menjadi regulator.

Demikian dikatakannya saat menerima perwakilan dari Forum Zakat (Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Dalam kesempatan itu, forum zakat mengeluhkan implementasi Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dengan adanya Inpres ini, semua pengelolaan zakat dipusatkan di Baznas.

"Seharusnya Baznas membatasi diri cukup sebagai regulator. Kalau menjadi operator dan regulator, dicampur itu nanti



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Baznas

justru menjadi persoalan. Karena seolah-olah zakat itu keterpusatan," kata Fahri.

Politisi F-PKS itu menekankan, pengelolaan bisa dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, karena yang penting pertanggungjawaban atau auditnya. Sehingga ia menyarankan agar Baznas membangun komunikasi dan kesepakatan tentang paradigma

pengelolaan zakat. Sehingga bukan aspek kekuasaan yang ditonjolkan.

Padahal falsafah pengelolaan zakat itu antara pembayar zakat (muzakki), dan penerima zakat (mustahiq) harus didekatkan. Oleh sebab itu, jika zakat diotonomisasi jauh lebih sesuai dengan filsafat pengelolaan zakat.

"Inpres itu punya pretensi otoriter terhadap Lembaga Amil Zakat yang sudah ada. Akhirnya Lembaga Amil Zakat itu mau tidak mau dipaksa ikut bergabung dengan Baznas," imbuh Fahri.

Terhadap inpres yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Fahri mengatakan agar LAZ tetap bekerja secara lokal. "Inpres itu kan sebenarnya tidak perlu memaksa," tegas politisi asal dapil NTB itu. ■

(S) foto: andri/mr

Teror Abu Sayyaf dan Ketegangan Laut Cina Selatan Jadi Perhatian DPR RI dalam Sidang AIPA

Delegasi DPR RI memberikan perhatian khusus pada dua isu penting dalam sidang AIPA *Preparatory Meeting and Meeting with the ASEAN Heads of Government/State during the 28th and 29th ASEAN Summit* yang berlangsung di Vientiane, Laos 5-6 September.

Ketua Delegasi DPR RI Agus Hermanto menjelaskan, Wakil Rakyat dari Indonesia, secara khusus memberikan perhatian pada dua isu penting yaitu teror penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina serta isu tentang ketegangan di Laut Cina Selatan.

"DPR RI menyambut baik Trilateral *Memorandum of Understanding* yang melibatkan tiga negara Indonesia,

Malaysia dan Filipina. Ini memberikan landasan hukum bagi patroli air gabungan untuk mengamankan perbatasan dan warga negaranya," kata Agus dalam rilisnya yang disampaikan kepada Parlemen, usai sidang, Senin (5/9).

Terkait isu Laut Cina Selatan, menurut Agus, DPR RI mengimbau semua pihak untuk menjaga komitmen penyelesaian damai. Ia menekankan hanya melalui pengendalian diri dan tidak melakukan tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan serta tetap berkomitmen untuk negosiasi bagi penyelesaian klaim tumpang tindih berdasarkan hukum internasional akan mengantar segenap pihak mencapai kesepakatan secara bersahabat.

Pertemuan tersebut juga berhasil merumuskan *AIPA Message* yang secara resmi disampaikan dalam pertemuan dengan pemerintah dari kawasan ASEAN yang juga sedang menghadiri perhelatan Asean Summit ke-28 dan ke-29.

"Kita sudah berhasil menyelesaikan AIPA

Komisi IX DPR RI Setuju Ratifikasi MLC untuk Lindungi Pelaut

Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham dan Menteri Perhubungan membahas ratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 (Maritime Labour Convention (MLC) 2006). Karena tujuan ratifikasi untuk memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal.

Dalam acara ini, para anggota yang mewakili fraksi memberikan pandangan terkait MLC yang sudah berlaku di negara lain sejak tahun 2006. "Semua fraksi sudah memberikan padangannya, kelihatannya semuanya setuju. Karena RUU MLC akan memberikan perlindungan hak-hak ketenagakerjaannya di luar negeri," ujar Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (5/9).

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi IX Irgan Chairul yang mengatakan setuju disahkannya MLC yang merupakan konvensi ketenagakerjaan maritim sebab jika diberlakukan akan memberikan perlindungan terhadap pelaut dan awak kapal untuk bekerja dengan nyaman.

Okky Asokawati juga berpendapat dengan adanya RUU MLC Indonesia berkewajiban untuk memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan yang



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

terkandung dalam MLC 2006. Pelaksanaan serta penegakannya akan dipantau oleh IMO dan ILO.

"Belajar dari beberapa peristiwa yang pernah terjadi di negara maritim, jika Indonesia memiliki MLC maka praktek

ketidakadilan, diskriminasi hak pengupahan dan hak-hak pekerja lainnya tidak terjadi lagi di atas perairan Indonesia," tutur politisi F-PPP.

Di tempat yang sama Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 adalah konvensi internasional yang telah disepakati oleh 2 organisasi internasional yaitu *Ioral Maritme Organization* (IMO) dan *Internasional Labour Organization* (ILO). Hal ini di

buat untuk melindungi pelaut, pemilik kapal dan pemerintah (negara), sehingga memiliki kepastian hukum dalam aturannya dengan seimbang dan fleksibel.

"MLC sangat dibutuhkan untuk diratifikasi karena untuk menunjang keberlangsungan pelaut-pelaut Indonesia yang saat ini bekerja di atas kapal-kapal asing dan kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar di luar negeri," ujarnya.

Upaya pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 merupakan tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang berprofesi sebagai tenaga kerja pelaut, meningkatkan kemampuan industri pelayaran sehingga dapat bersaing di dunia internasional.

Tercatat total pelaut saat ini adalah 690.771 orang. Untuk Jabatan Perwira yang bekerja di atas kapal asing sebanyak 102.474 orang. Untuk jabatan rating yang bekerja di atas kapal asing sebanyak 184.930 orang. Total yang bekerja di atas kapal asing sebanyak 287.404 orang. ■

Message yang berisikan 26 isu penting yang menjadi perhatian anggota parlemen di kawasan ASEAN. Hasil ini merupakan masukan dari para wakil rakyat ASEAN kepada kepala negara dan pemerintahan yang juga sedang bersidang di Vientiane, Laos ini," kata Agus, yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

Pada kesempatan yang sama, *President of the National Assembly of Lao PDR, Madame Pany Yathotou* menyebut pertemuan anggota parlemen dari negara ASEAN adalah kontribusi dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memimpin delegasi Indonesia pada sidang AIPA di Laos

ini. Ini sejalan dengan cetak biru ASEAN Community.

Asean Summit ke-28 dan ke-29 di Laos dihadiri kepala negara dan pemerintahan, pimpinan parlemen termasuk kepala negara sahabat Pertemuan kali ini mengusung tema "Turning Vision into Reality for a Dynamic Asean Community". ■

(foto mp) foto: Dok/mr.

Layanan RS Semen Padang Sudah Baik

Layanan RS. Semen Padang di Kota Padang, Sumatera Barat, di nilai sudah sangat baik. Tidak saja dari fasilitas kesehatan, tapi layanan pasien juga baik. Bahkan, fasilitas kesehatan VVIP untuk para Anggota DPR RI juga sangat memadai.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie menyampaikan penilaian positif tersebut usai meninjau RS. Semen Padang, Senin sore (5/9). Dalam kesempatan itu Ichi, begitu ia akrab disapa, sempat melihat langsung pasien cuci darah yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.

Yusri, pasien cuci darah tersebut setiap dua minggu harus cuci darah dan ini sudah lima tahun berjalan. Sebelum menggunakan JKN, ia harus membayar Rp800 ribu sekali cuci darah. "Layanan BPJS di RS ini sangat



Anggota BURT Andi Fauziah mengunjungi pasien di RS. Semen Padang

baik," nilai Ichi.

Sementara mengomentari layanan VVIP untuk para Anggota Dewan di RS ini, sudah sangat memadai. Hanya saja,

lanjut Ichi, belum ada loket khusus untuk Anggota Dewan untuk memudahkan layanan. Seperti diketahui, layanan VVIP Jamkestama untuk para Anggota Dewan diberikan lewat PT. Jasindo, asuransi khusus untuk VVIP.

Yang juga menarik, kata Ichi, desain RS ini seperti mall. Saat memasuki RS, yang terlihat pertama adalah gerai cafe dan toko. Ini membantu para pasien bisa sembuh lebih cepat, karena suasananya begitu nyaman. "Dulu saya juga menyarankan agar RS didesain

senyaman mungkin dan pelayan RS tidak mengenakan busana putih. Pasien biasanya merasa takut kalau sudah bertemu pelayan berbaju putih." ■

(anb) foto: baurer/br.

Parlemen Maroko Pelajari Sistem Pendukung DPR RI

Badan Keahlian Dewan (BKD) menerima kunjungan delegasi Parlemen Maroko. Tujuan kedatangan tersebut untuk mempelajari sistem pendukung yang ada di DPR RI.

“Mereka ingin mempelajari sistem pendukung yang ada di DPR RI. Mereka berkeinginan untuk membentuk satu badan yang secara khusus

memberikan dukungan di bidang keahlian,” ungkap Johnson Rajagukguk Kepala BKD di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (02/9).

Selain menjelaskan mekanisme dua *supporting system* yang ada di parlemen Indonesia. Johnson juga menjelaskan, mekanisme pelaksanaan tugas BKD secara mendalam dan terperinci. "Sehingga tata cara pelaksanaan BKD itu bisa mereka pahami. Jadi, bukan hanya kelembagaannya saja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Maroko Rachida Benmassaoud memberikan apresiasi kepada BKD. Ia juga mempertanyakan filosofi pembentukan BKD, dimana bidang keahlian saling terintegrasi. Menurutnya, sistem pendukung disana

kurang efektif karena dibentuk berdasarkan bidang tertentu.

"Mereka menerima dengan sangat positif. Dengan mempelajari kelembagaan kita sekarang ini, mereka ingin mengintegrasikan bidang-bidang yang perlu untuk diintegrasikan, sehingga terjadi sinergitas," imbuh Johnson.

Sebelumnya, delegasi Parlemen Maroko juga bertemu dengan Inspektur Utama (Irtama) membahas sistem pengawasan internal penggunaan keuangan negara.

Turut hadir segenap jajaran BKD DPR RI, Rachida Benmassaoud (Deputy Speaker of the House of the Representative), Rachid El Menyari (Member of the House of Councillors), Abderazzak Naou, Wafae Znaidi, Dina Melhem, Alice Maurel. ■

(annmp) foto: Achka/br.



Kepala BKD Johnson Rajagukguk

BPOM Perlu Kerjasama dengan Kominfo Terkait Maraknya Makanan Kadaluarsa

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan terkait maraknya makanan kadaluarsa yang diperjualbelikan di media online (daring-red), Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk menutup penjualan online yang tidak memiliki ijin edar.

“ Kami sudah meminta Badan POM untuk bekerja sama dengan pihak Kominfo untuk melihat suatu makanan yang tidak memiliki ijin edar, ini memang membutuhkan orang dibidang IT untuk melakukan pemantauan karena apa yang beredar di dunia maya sangat signifikan dan hal ini butuh dukungan dari Kominfo,” ujar Dede di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Terkait hal ini, menurut Dede, Komisi IX akan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memberikan kewenangan lebih kepada BPOM. Karena BPOM memiliki perangkat untuk penggalian data, informasi maupun secara kimiawi

namun belum memiliki payung hukum untuk menelusuri suatu kasus secara mendalam.

“Tetapi untuk menunggu sampai dibuat UU saya rasa lama, mungkin Peraturan Presiden (Perpres) yang di sampaikan presiden bisa digunakan untuk memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menyelidiki secara meyeluruh, komprehensif dan melakukan penangkapan barang bukti,” tutur politisi Fraksi Demokrat tersebut.

Diharapkan dengan adanya Perpres tersebut, masalah terkait bahan yang tidak layak pakai atau kadaluarsa dapat diselesaikan oleh Badan POM. ■



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

(rnm), foto: jayadi/hr

Komisi II Pertanyakan Kewajiban Kepda Aceh Harus Orang Asli Aceh

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mempertanyakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Aceh soal syarat untuk maju sebagai kepala daerah di Aceh harus orang Aceh asli. Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, (5/6).

“ Kita minta ketegasan apakah untuk maju sebagai kepala daerah di Aceh harus orang aceh asli?,” tanya Lukman.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri juga mempertanyakan hal sama soal kejelasan aturan dalam PKPU tersebut. “Yang dimaksud orang Aceh itu gimana? Apakah dia lahir di Aceh atau berdasarkan keturunan Aceh?” sambungnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU Juri Ardiantoro menjelaskan dalam proses penyusunan PKPU ada tahap uji publik yang dilewati. Sehingga ada usul dari masyarakat Aceh agar tidak hanya WNI sebagai syarat untuk maju, tetapi

juga warga Aceh.

“Saat menyusun draf PKPU ada tahap uji publik. Jadi publik memberi catatan terhadap PKPU. Ada rombongan A c e h y a n g b e r i



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy

masukannya bahwa tak hanya syarat WNI, tapi juga harus warga Aceh,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Lukman Edy menegaskan bagaimanapun, sikap Komisi II jelas ingin mengembalikan PKPU agar sesuai dengan UU yang berlaku, padahal dalam UU Pilkada disebutkan syaratnya cukup WNI.

Sebagaimana diketahui, dalam PKPU pasal 12 disebutkan jika calon kepala daerah di Provinsi Aceh harus memenuhi syarat sebagai orang asli Aceh. PKPU No 6 Tahun 2016 tentang Pilkada di daerah otonomi khusus itu muatannya disinyalir mengarah pada primordialisme. ■

(hs.mp), foto: jayadi/hr

Legislator Beri Catatan Untuk PKPU

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah memberikan beberapa catatan mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang kini sedang dibahas Komisi II dengan KPU. Hal itu disampaikan ketika RDP dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Dirjen Otda Kemendagri pada Senin malam, (5/9) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam UU No 10 Tahun 2016 pasal 73 ayat (1) tentang sanksi bagi pelaku politik uang, disebutkan bahwa perilaku politik uang adalah memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Bagi Hetifah, PKPU harus lebih jelas mengatur lebih rinci klausul berdasarkan nilai kewajaran tersebut agar tidak salah tafsir. "Nilai kewajaran dan kemahalan antar daerah memiliki perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh, nilai kemahalan di pulau Jawa dengan Kalimantan tentu terdapat perbedaan. Oleh karena itu, PKPU harus mampu menerjemahkan pasal dan penjelasan ini," tutur Hetifah.

Politisi Golkar ini juga memberikan catatan dalam draft PKPU tentang Kampanye Calon Gubernur/Wagub,



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah

Bupati/Wabub, Walikota/Wakil Walikota dalam pasal 12 ayat (4). Disebutkan bahwa Paslon harus mendaftarkan relawan kampanye pasangan calon (Paslon) kepada KPU. Bagi Hetifah, pasal ini perlu diberikan tambahan. "Pasal ini memerlukan tambahan, yakni sanksi bagi Paslon yang tidak mendaftarkan relawan kampanye Paslon, serta pembubaran relawan kampanye yang tidak terdaftar di KPU," terangnya.

Selain itu mengenai kampanye yang dilakukan oleh relawan Paslon, Hetifah mencatat PKPU harus mengatur alat

peraga kampanye yang dicetak atau dibuat relawan. "PKPU harus mengatur alat peraga kampanye yang dicetak atau dibuat para relawan. Ketentuan tersebut agar disamakan, seperti ketika PKPU mengatur pembuatan alat peraga kampanye yang dibuat oleh parpol pengusung Paslon," jelasnya.

Selain itu terkait kampanye yang dilakukan di media cetak dan elektronik, Hetifah juga mencatat PKPU perlu mengatur durasi iklan di televisi agar lebih jelas dan tertata. "PKPU juga perlu mengatur durasi iklan di televisi, misalnya, iklan selama 30 detik, 1 menit dan seterusnya," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar kampanye dengan cara tatap muka perlu melibatkan Bawaslu untuk menghindari transaksi politik uang. "Terkait dengan kampanye dengan cara pertemuan tatap muka atau dalam bentuk kegiatan lain, perlu melibatkan Bawaslu atau Panwaslu. Hal ini dimaksudkan adanya pengawasan dari penyelenggara pemilu untuk menghindari politik uang," pungkasnya. ■

(b) foto: Ranti/br.

SKK Migas Diminta Jelaskan Terjadinya Tren Penurunan *Lifting* Minyak

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian minta Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan penyebab terjadinya tren penurunan *lifting* minyak bumi dan gas bumi yang cukup tajam. Pasalnya, beberapa hari lalu pada saat rapat kerja dengan Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan prediksi *lifting* minyak bumi di APBN 2017 sebesar 780 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi setara 1.150.000 barel per hari.

“Komisi VII DPR RI mengadakan rapat dengan Kepala SKK Migas dan pimpinan K3S, adalah untuk mendapatkan data yang akurat dari SKK Migas dan K3S. Kami juga ingin mendengarkan penyebab terjadinya tren penurunan yang cukup tajam *lifting* minyak bumi dan gas bumi,” papar

Ramson saat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Kepala SKK Migas dan pimpinan K3S di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Seharusnya, tegas politisi dari Gerindra ini, *lifting* minyak meningkat jika dilihat dari potensi yang ada di bumi Indonesia ini. Tetapi kebijakan-kebijakan dan sistem

mempengaruhinya. Pada tahun 2000 *lifting* minyak sekitar 1,2 juta barel per hari.

"Kalau dilihat dari *revenue* sebenarnya sekarang sudah tidak signifikan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2016 nanti di APBN-P dari minyak dan gas bumi hanya 30 triliun. Kalau dibandingkan dengan pendapatan di Sektor Pajak yang 1.500 triliun, jadi hanya 2%-nya," terang Ramson.

Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa di 2014 PNBP dari minyak dan gas sebesar 216 triliun atau 216,8 triliun rupiah. Saat itu penerimaan dari pajak sekitar 1.103 triliun. Jadi sekitar 20% lebih ratio antara PNBP dari minyak dan gas terhadap penerimaan pajak di struktur APBN.

"Saat ini hanya 2% dari penerimaan pajak, dua tahun lalu 20%. Jadi luar biasa, tentunya dipengaruhi *lifting* dan penurunan harga minyak serta gas di pasar global," mantapnya.

Pembahasan RUU Minol Dibagi dalam Empat Kluster

Ketua Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Arwani Thomafi menjelaskan bahwa pembahasan RUU Minol masih di tingkat Panitia Kerja. Dimana dalam perkembangan pembahasan RUU ini dibagi dalam empat kluster. Yaitu, larangan total terhadap Minol seperti di Aceh, larangan dengan pengecualian, larangan tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan, dan tidak perlu ada larangan melainkan cukup dengan pengendalian atau pengaturan.

“ Arus pelarangan karena pengaturan Minol dalam RUU ini penting sebagai payung hukum saat ini. Sebab, ada Perda-perda dan Pergub masing-masing di daerah berbeda dalam menyikapinya. Tapi kesimpulannya ada pengaruh negatif pada masyarakat. Baik kesehatan maupun kriminalitas,” tegas Waketum PPP itu pada forum legislasi 'Tarik-Ulur RUU Larangan Minuman Beralkohol' pada Selasa (6/9) bersama Ketua APINDO Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana, dan Ketua YLKI Tulus Abadi di Gedung DPR RI Jakarta.

Karena itu kata Arwani, perlu dicari titik temu dari pengaruh negatif tersebut. Selanjutnya, pelarangan dalam kondisi tertentu itu dinilai tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena itu RUU ini berusaha untuk meminimalisir, dan itu tidak mengganggu kepentingan investasi karena ada pasal-pasal pengecualian (asing) dan diperbolehkan untuk kepentingan ritual agama tertentu.

Pada kesempatan itu, ia ingin mengkonfirmasi apakah benar yang diajukan pemerintah dalam hal ini Plt Menteri ESDM bahwa 780 ribu barel per hari dan setara 1.150.000 barel per hari untuk *lifting* gas bumi yang akan ada dalam struktur APBN. Karena ini dua asumsi makro yang harus masuk dalam APBN sesuai dengan UU yang ada dan yang menentukannya adalah Komisi VII DPR RI bersama pemerintah.

"Saya melihat, menghitung ini apakah benar dan sudah sesuai dengan yang sudah disampaikan di sini. Artinya setiap K3S tertera mengenai *lifting* minyak dan gas, saya menghitung memang agak sesuai," ungkapnya.

Tetapi yang menjadi problem, tukasnya, bahwa SKK Migas menyampaikan di sini, ada tren penurunan yang cukup tajam. Jika 2017 minyak 780 ribu barel per hari, maka 2018 sudah 630 ribu barel per hari, dan 2019



Ketua Panja RUU Minol H. Arwani Thomafi berbincang usai acara forum legislasi

"Jadi, ada ruang kemajemukan yang kita hormati, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh pihak yang berwenang (menteri, Pemda) seperti hotel dan restoran. Sehingga hanya ada ruang pembatasan yang tegas dan jelas. Itu, semata agar Minol tidak menjadi *trend* di masyarakat," ujarnya.

Selain itu kata Arwani, pentingnya pengawasan dengan membentuk tim terpadu di pusat dan daerah. "Soal bentuknya seperti apa? Nanti dibicarakan terkait pentingnya peran serta tokoh masyarakat, dan untuk ketentuan pidananya ada tiga macam, yaitu

rehabilitasi, denda dan dipenjara," katanya.

Pada prinsipnya pada dua bulan ini baik pemerintah, fraksi-fraksi sepakat konsolidasi untuk menyampaikan pada tingkat akhir Panja, meski ada yang ingin melakukan pendalaman. Sebab, jangan sampai pelaksanaannya di lapangan 'mandul'. "Jadi, pembahasan RUU ini harus melibatkan dua pihak; pemerintah dan DPR RI. Dimana dari 146 DIM ini yang selesai dibahas baru 37 DIM, terbagi ke dalam 6 kluster tersebut," pungkasnya.

Ketua APINDO Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana, meminta DPR RI dan pemerintah berhati-hati dalam membahas RUU Minol tersebut di tengah ekonomi negara yang belum membaik. Sebab, cukai Minol pada APBN 2017 ini dipatok Rp6 triliun, dan di tahun 2019 akan dipatok Rp9 triliun.

"Jangan sampai ada pelarangan, karena dampaknya sangat luas. Baik produksi, distribusi, konsumsi, tenaga kerja dan sebagainya, sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah yang akan menjadi ancaman bagi investor," jelas Danang.

Sementara Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan ada dua komoditas yang dikenai cukai oleh pemerintah, yaitu rokok dan Minol. "Cukai itu untuk barang yang berdampak negatif secara eksternal dan internal, yaitu pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi, cukai itu pajak dosa. Karena itu dalam masalah Minol jangan memprioritaskan pendapatan ekonomi. Sebab, filosofinya pada aspek pengendalian bukan aspek ekonomi. Yaitu dampak negatifnya lebih besar daripada sekadar ekonomi. Pendapatan itu dampak sampingan, bukan pokok. Jadi, itulah yang menjadi dasar pembahasan RUU Minol ini," pungkasnya. ■



Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian

trennya menurun menjadi 540 ribu barel per hari.

"Ini memang sangat memprihatinkan, 2020 menjadi 480 ribu barel perhari artinya yang pesimisnya. Sementara tren konsumsi BBM dalam negeri cukup tinggi. Ada kecenderungan ini kelemahan dari kebijakan sistem, karena suatu negara kompetitif itu sangat dipengaruhi sistem dan kebijakan," tandasnya. ■

(sc) foto: Himma/br.

(sc) foto: Ranti/br.

Komisi V DPR RI Apresiasi Pembangunan Sekolah Pelayaran di Kepri

Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau dipimpin Wakil Ketua Komisi/Ketua Tim Michael Wattimena, Didampingi 15 Anggota Komisi V kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan terhadap rencana Pemerintah Pusat membangun Tol Laut, sistem transportasi laut nasional, dan kesiapan pelabuhan di Provinsi Kepri. Batam, Jumat (2/9)

Kepada Komisi V DPR RI Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menyatakan masih terus bermimpi untuk menjadikan Kepri sebagai poros maritim Indonesia. Atas dasar itu, Gubernur meminta Presiden untuk membangun Sekolah Pelayaran di Kepri.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin sangat mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan permohonan pembangunan Sekolah Maritim atau Sekolah Pelayaran di Provinsi Kepri. Karena, kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf internasional sangat dibutuhkan di Provinsi Kepri. Apalagi seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepulauan Riau.

"Saya minta dukungan Anggota Dewan dari Komisi V DPR RI dan juga Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk membangun Sekolah Pelayaran di Kepri," ujar Gubernur.

Menurut Nurdin, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak. Karena Kepri tidak punya daratan yang potensial untuk diolah. Karena itu Nurdin sangat mengharapkan agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan. Ia juga berharap rencana pembangunan sekolah pelayan tersebut bisa direalisasikan Tahun 2017 nanti.

"Kami butuh bantuan Pemerintah Pusat untuk bangunan fisiknya. Untuk lahan, kami sudah siapkan di Tanjung Uban dengan lokasi strategis yang dekat dengan pelabuhan. Tenaga pengajar yang berkualitas banyak di sini. Saya pun mau turun langsung

untuk mengajar," tegas Nurdin.

Sementara itu, Irwansyah, Anggota Komisi III DPRD Kepri yang membidangi masalah infrastruktur dasar mengatakan, selain permintaan Sekolah Pelayaran, berbagai masalah terkait pembangunan kelautan di Kepri. Diantaranya adalah realisasi Pengembangan Pembangunan

pendapatan dari sektor tersebut diambil Pemerintah Pusat seluruhnya. Ada sekitar 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri. Jika satu titik, potensi penerimaannya bisa mencapai Rp. 42 miliar, tentu untuk 18 titik lebih besar lagi.

"Kepada Komisi V DPR RI, kami mohon untuk segera membantu Kepri menyelesaikan persoalan ini. Padahal menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sudah jelas disebutkan kalau itu hak daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan menggunakan UU Kelautan, jadi tidak pernah bertemu kesepakatan itu. Kondisi defisit keuangan seperti sekarang membuat Kepri sulit untuk membangun. Ditambah lagi Natuna, sebagai penghasil migas, saat ini Kepri hanya dapat dana bagi hasil Rp11 miliar, dari sebelumnya Rp800 miliar." imbuhnya.

Irwansyah juga menambahkan, apabila Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaannya ke Kepri, ia optimis bahwa defisit anggaran yang terjadi bisa dibantu lewat sektor labuh jangkar.

Menanggapi beberapa permintaan dari Pemerintah Provinsi Kepri, Wakil Ketua Komisi V, Michael Wattimena, yang juga Ketua Tim Panja Konektivitas laut berjanji akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat dan sekaligus menjadi mediator. "Berbagai persoalan yang disampaikan ini, akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Kami akan minta keterangan dari berbagai instansi terkait," janji Michael.

Hal yang sama juga disampaikan Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono. "Saya akan sampaikan berbagai keluhan dan permintaan Kepri itu ke Menteri Perhubungan. Semoga segera ada kebijakan," pungkasnya. ■



Foto bersama Tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI dengan Gubernur Kepri

Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan kontainer dan transit kapal bertaraf internasional selalu gagal. Padahal pemerintah Kepri dan BP Kawasan (dulu Otorita Batam) sudah sejak 5 tahun lalu sudah mengusahakan berbagai hal untuk pelabuhan.

"Posisi strategis, lahan, listrik sudah oke, semua fasilitas sudah bagus. Tetapi realisasinya tidak ada juga sampai saat ini. Pelabuhan Batu Ampar juga sudah beberapa kali dikunjungi, disepakati, tapi ujung-ujungnya gagal. Kami mohon kepada Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan pelabuhan ini. Kalau pelabuhan ini selesai tentu akan membawa perubahan besar kepada transportasi laut di Kepri," jelas Irwansyah.

Selanjutnya, Irwansyah juga menyampaikan persoalan parkir kapal/labuh jangkar, yakni 0 - 12 mili. Selama ini

Kasus Bayi Mesiya Tak Boleh Terulang Kembali

Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw menyesalkan kasus meninggalnya Mesiya Rahayu, bayi yang berusia 15 bulan akibat tidak mendapatkan penanganan medis yang maksimal.

“ Mesiya yang menderita infeksi paru-paru itu awalnya sempat ditangani oleh RS Sitanala yang berlokasi di Tangerang, Banten. Akan tetapi, karena tidak memiliki alat yang memadai, maka Mesiya dirujuk ke rumah sakit lain.

Namun sayangnya, anak kelima dari pasangan Undang Misrun dan Kokom Komalasari itu tidak bisa diterima oleh empat rumah sakit lain akibat kapasitas ruang perawatan intensif (ICU) yang tersedia sudah penuh.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (KemenKes) harus memberi bantuan berupa tambahan anggaran untuk meningkatkan kapasitas



Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw

ruang perawatan intensif di setiap RSUD," ujarnya melalui pers rilis yang diterima Parlemen baru-baru ini.

Pasalnya menurut politisi partai Gerindra, peningkatan kapasitas ruang dan peralatan medis diperlukan untuk mengantisipasi adanya peningkatan pasien

yang membutuhkan ruang perawatan intensif (ICU).

"Jangan sampai, kejadian yang dialami Mesiya terulang kembali akibat terbatasnya kapasitas ruang perawatan intensif di setiap rumah sakit," jelasnya.

Saat ini, lanjut Roberth, dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan maksimal untuk masyarakat seperti yang tertuang dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

Karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga untuk penghematan keuangan negara seharusnya tidak dipukul rata. Sebab, hal tersebut bisa berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

"Dengan demikian pemerintah harus meninjau ulang pemangkasan anggaran, khususnya terhadap pelayanan masyarakat," tukas politisi asal Papua itu. ■

(rmm, nsp) foto : jayadi/mr.

Pemerintah Harus Waspadaai Masuknya Virus Zika

Pemerintah diminta untuk segera mengintensifkan langkah-langkah penanganan virus Zika. Pasalnya, penyebaran virus zika sudah semakin meningkat dan merebak ke negara-negara tetangga lainnya.

Terakhir, Malaysia telah mengkonfirmasi bahwa virus itu telah ditemukan di negara tersebut.

“ Data terakhir, di Singapura sudah ada 185 pasien terinfeksi virus zika. Begitu juga di Malaysia. Dengan kondisi ini, pemerintah tidak boleh lagi berleha-leha," tandas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Dauly, Senin (5/9).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI kembali mengingatkan Kemenkes agar bersungguh-sungguh mengantisipasi virus zika. Sejauh ini, persebaran virus zika diketahui lebih banyak melalui nyamuk *aedes aegypti*. Di tengah musim penghujan seperti sekarang ini, perkembangbiakan nyamuk dikhawatirkan akan mempermudah persebaran virus tersebut.



Pimpinan Komisi IX DPR RI sedang berbincang saat rapat

"Komisi IX juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan anggaran yang cukup dalam perang melawan zika. Karena kasusnya baru, anggaran yang dimiliki Kemenkes sejauh ini masih diperuntukkan menangani penyakit menular lainnya. Belum termasuk, anggaran untuk menangani dan

menanggulangi virus Zika," katanya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak agar Kemenkes melakukan penelitian-penelitian khusus terkait virus zika. Balitbang Kemenkes diminta untuk mengundang para pakar dan ahli kesehatan untuk berpartisipasi. Pasalnya, sampai sejauh ini pengobatan terhadap pasien yang terjangkit virus zika belum ditemukan. Indonesia sebagai negara besar tentu harus melakukan inisiasi penelitian dalam konteks perlindungan masyarakat.

"Seingat saya, beberapa waktu lalu, Kemenkes berhasil melakukan penelitian dalam menyediakan vaksin flu burung. Kita mengharapkan, hal yang sama bisa dilakukan dalam penanganan virus Zika." tegas Saleh menambahkan. ■

(aa) foto : jayadi/hr.

UU *Tax Amnesty* Harapkan Jumlah Wajib Pajak Meningkat

Dengan Undang-Undang *Tax Amnesty* diharapkan jumlah wajib pajak yang biasanya hanya 10-12% bisa naik menjadi 38% sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3%. Itu artinya, ada espektasi lebih baik bagi pembayar pajak, sementara kondisi ekonomi kita masih belum sehat.

“ Untuk itu pemerintah melakukan kebijakan dengan repatriasi (menarik uang di luar negeri ke dalam negeri), yang selama ini luput dari pajak. Sedangkan untuk menutup APBN kalau hanya mengandalkan utang resiko politiknya besar, sehingga perlu TA, karenanya perlu sosialisasi *tax amnesty* ini,” tegas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mokhammad Misbakhun dalam *Dialektika Demokrasi* “*Tax Amnesty* untuk siapa?” bersama pakar ekonomi INDEF Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Misbakhun, kalau ikut TA dikenai pajak 2%, kalau tidak, maka dipersilakan membereskan SPPT-nya. Hal itu agar target TA Rp 165 triliun terpenuhi. “Dengan UU TA ini, maka deklarasi Rp 4.000 triliun dari luar negeri dan Rp1.000 triliun dalam negeri, dari target seluruhnya Rp10.000,- triliun. Dan, kini pemerintah dapat garansi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rp1.000 triliun,” ujarnya.

Dengan demikian kata Misbakhun, ada jaminan dari pengusaha. Tapi, kalau itu tidak terbayar maka akan mendapat sanksi 200%. “Untuk memenuhi target itu, maka pemerintah harus mempunyai *manual books*, ada keteladanan dari pengusaha, pejabat negara, maupun elit politik untuk mengikuti TA. Jadi, *Tax Amnesty* itu terkait dengan harta yang dimiliki masyarakat, dan bukannya penghasilan. Kalau penghasilan dibawah Rp4,5 juta tidak dikenai pajak,” pungkasnya.

Yang menjadi persoalan kata Enny Sri Hartati, pemerintah harus jujur terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini, karena TA belum mencapai target. Bahkan jauh dari target Rp350 triliun. Menurut DJP yang masuk baru 79,8 % atau Rp 3,13 triliun (dari perorangan dalam negeri), non badan, dan non UMKM.

Padahal, sebelum repatriasi selalu bilang



Anggota Komisi XI DPR RI Mokhammad Misbakhun dalam acara *dialektika demokrasi*

ada 3.000 perusahaan tak bayar pajak sama sekali. “Itu fakta, dana yang dijanjikan melalui repatriasi, tapi yang masuk tetap dari dalam negeri sebesar 79,8% tersebut. “Itu persoalan utama dan ini sudah berjalan dua bulan, yang selama sebulan sebelumnya hanya Rp300 miliar,” katanya.

Enny mengatakan jika pajak itu hampir tak ada yang berasal dari luar negeri. Sehingga tak ada kepastian, dan menimbulkan keresahan masyarakat sebagai implikasi hukum dari TA itu sendiri. “Makanya, penjelasan bukan harta warisan, penghasilan di atas Rp4,5 juta dan sebagainya itu tetap meresahkan masyarakat,” tambah Enny.

Sementara pemerintah tidak mempunyai basis data (data base) kependudukan. Kalau semua dilaporkan dalam pengisian SPPT, itu persoalan administrasi yang belum beres. Karena itu pembetulan SPPT menjadi ancaman dan resikonya tak ada garansi, kalau gagal, akan banyak yang kena penalti 200%. “Padahal, apa yang kita beli seperti mobil, rumah, gaji dan lain-lain sudah kena pajak. Jadi, repatriasi ini gagal, BUMN yang menjadi sasaran tak bayar pajak, bahkan perorangan tak punya NPWP. “Yang punya PTKP sekitar 75 juta orang, dan NPWP sekitar 35 juta orang, dan yang lapor hanya 9 juta orang,” jelas Enny.

Mestinya selisih tersebut yang harus menjadi sasaran TA. Untuk itu kata Enny, kuncinya adalah penegakan hukum dan basis data kependudukan dan perusahaan

pembayar pajak. “Jadi, carut-marutnya TA ini yang menimbulkan keresahan masyarakat, dan itulah yang harus dievaluasi pemerintah. Bahwa ancaman pada pengusaha tanpa data juga tak akan berhasil, dan kalau ini dibiarkan, pada 2017 akan terjadi kiamat pajak, yaitu pajak tak tercapai target, dan APBN akan selalu defisit,” ungkapnya.

Dengan demikian Enny minta kejujuran pemerintah. “Dulu pemerintah mempunyai data yang lebih dan menjanjikan dari *Panama Papers*. “Itu yang seharusnya didata dan dikejar untuk membayar pajak. Kita jangan segera senang dengan uang masuk Rp2 triliun (dalam negeri), karena pada triwulan ke depan akan terjadi multi efek terhadap APBN. Bahwa tanpa perbaikan data bas, maka sama saja memaksakan berlakunya UU TA ini,” pungkasnya. ■

(9/ Foto: Sofyan/jk)

UU Desa Sebagai *Self Governing Community*

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko menegaskan keberadaan UU Desa dibuat untuk memuliakan desa, termasuk masyarakat, perangkat serta kepala desanya. Hal itu dikatakan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan DPRD Kabupaten Jombang, Lumajang, Pacitan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Senin, (5/9).

Komisi IV Bahas RKA K/L Tahun 2017 Bersama Mentan

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis diantaranya memberikan kontribusi yang besar dalam penyedia bahan pangan, penyumbang PDB, pendapatan domestik, penghasil devisa negara, penyerapan tenaga kerja serta sebagai salah satu sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan.

“ Program pembangunan pertanian di Indonesia merupakan program pembangunan yang diharapkan dapat menuju kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, mutu dan kualitas pangan,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman guna membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2017, dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis, serta isu-isu aktual lainnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Raker ini merupakan tahapan dari siklus anggaran DPR RI untuk menetapkan APBN 2017 yang merupakan salah satu fungsi DPR RI. Mengacu pada nota keuangan, pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian sebesar 23,907 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi



Suasana rapat Komisi IV DPR RI

IV DPR RI meminta penjelasan Menteri Pertanian terkait pembahasan RKA K/L tahun anggaran 2017 serta usulan program-program yang akan didanai DAK berdasarkan kriteria teknis secara mendetil.

"Secara khusus kami meminta dalam menetapkan program juga disertai dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Selain itu kami juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kurang bayar untuk subsidi

pupuk, yang menurut kami belum tergambarkan dalam nota keuangan beserta rancangan APBN tahun anggaran 2017," ucapnya.

Pada akhir raker tersebut diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pengurangan pagu RKA K/L Kementerian Pertanian yang sebelumnya sebesar Rp25,8 triliun, dan menerima pagu RKA K/L

Kementerian Pertanian tahun 2017 sebesar Rp23,9 triliun.

Komisi IV juga menerima penjelasan atas dana alokasi khusus bidang pertanian tahun anggaran 2017 sebesar 1,75 triliun yang terdiri atas usulan dana alokasi khusus provinsi sebesar 1,57 triliun dan DAK Kabupaten kota sebesar 185 miliar. Serta akan mendalami dan memutuskan kriteria teknis penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama eselon I. ■

“ UU Desa itu memang dibuat untuk memuliakan orang desa, termasuk masyarakat, perangkat dan kepala desanya. UU ini dimaksudkan agar desa sebagai *self governing community* yakni komunitas yang mengurus urusannya sendiri," tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan hal itu bukan berarti semangatnya desa harus lepas dari kabupaten. Tetapi agar pembangunan, pemberdayaan desa dilakukan oleh desa, termasuk soal masa jabatan perangkat desa. "Pun mengenai soal perangkat desa ini juga diperlukan kepastian masa jabatan bagi perangkat desa terutama di pasal 48 sampai 53. Sudah diatur disana," tegasnya.

"Sehingga masa jabatan sampai 60 tahun adalah penghargaan terhadap energi, loyalitas terhadap desa. Maka

diberi penghargaan sampai 60 tahun. Semangat UU seperti itu," sambungnya.

Oleh karenanya ia mengaku sedih jika ada aturan dibawahnya yang melanggar ketentuan tersebut. "Karenanya ketika ada aturan di bawah UU yang melanggar ketentuan tersebut, itu menyedihkan. Itu tidak hanya terjadi di hanya perangkat desa, tetapi juga dibanyak hal seperti BUMD," jelasnya.

Mantan aktivis gerakan 1998 itu juga menegaskan tidak ingin polemik masa jabatan perangkat desa ini dikaitkan dengan konstelasi politik. "Kita tak mau soal masa jabatan ini berkaitan dengan konstelasi politik. Saya gak mau," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui,

keputusan Bupati Jombang membatasi jabatan perangkat desa hanya 10 tahun. Padahal dalam UU Desa disebutkan bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai usia 60 tahun. ■



Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko

UU Arsitek Diharapkan Dinamika Profesi Arsitek Maju

Mencermati rekapitulasi DIM RUU tentang Arsitek yang telah dibacakan saat Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan ada sedikit kekhawatiran, karena penghapusan substansi lebih banyak dari pada DIM yang tetap, DIM penyempurnaan, DIM penambahan maupun lain-lain.

“Kami khawatir pemerintah mengebiri beberapa bagian dari UU ini yang menjadi aspirasi DPR RI, pemerintah dan DPR harus punya frame berfikir yang sama agar UU tersebut bisa menjadi sarana untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia,” ujar Sigit disela-sela raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Penguatan profesi arsitek pada UU ini, perlu didorong agar profesi ini menjadi profesi yang independen. Oleh karenanya perlu bantuan dari pemerintah agar tidak mengebiri, tetapi harus ikut mendorong profesionalisme lembaga-lembaga profesi.

“Kita ingin agar keberadaan UU ini bukan justru mempersulit arsitek, tetapi diharapkan dengan adanya UU ini akan membuat dinamika berprofesi arsitek menjadi sangat maju,” tegasnya.



Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

Sigit juga menyampaikan, jumlah arsitek di Indonesia hanya ada sekitar 17 ribu orang, dan 90 orang diantaranya merupakan arsitek yang sudah bersertifikasi dan sudah setara untuk level ASEAN. Hampir 1 orang arsitek berbanding dengan 15 ribu

penduduk Indonesia.

“Pembahasan RUU Arsitek harus dilakukan dengan hati-hati, karena yang diatur dalam UU ini mengenai sertifikasi, lisensi dan sertifikasi yang berkaitan dengan profesionalisme kerja, lisensi berkaitan dengan kewenangan, dan aturan-aturan yang lain,” himbau politisi F-PKS tersebut.

Total jumlah anggota Panja pembahasan RUU Arsitek Komisi V sebanyak 29 orang, dengan komposisinya yaitu F-PDIP 5 orang, F-Golkar 5 orang, F-Gerindra 4 orang, F-Demokrat 3 orang, F-PAN 3 orang, F-PKB 2 orang, F-PKS 2 orang, F-PPP 2 orang, F-Nasdem 2 orang, F-Hanura 1 orang.

Sementara untuk susunan anggota Panja dari pihak pemerintah, Komisi V mempersilahkan kepada Menteri PUPR untuk menugaskan nama-nama pejabat eselon I dan II serta pejabat terkait lainnya dari Kementerian Lembaga yang akan mewakili pemerintah. ■

(dep.mpr) / foto: Hinahrabr

Melalui LPDP, Diharapkan Tingkatkan Jumlah Dosen S2 dan S3

Anggota Komisi X DPR RI Junico Siahaan berharap, dengan adanya beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat meningkatkan jumlah dosen bersertifikasi S2 dan S3. Mengingat, minimnya jumlah dosen S2 dan S3 di Indonesia. Sehingga, kesempatan beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh dosen.

Demikian dikatakan Junico saat RDP Panja Beasiswa Dikti dan SM3T dengan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kemen PPN/Bappenas, dan LPDP Kementerian Keuangan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/09).

“Harapannya dengan beasiswa LPDP ini dapat meningkatkan jumlah dosen bersertifikasi S2 dan S3. Kita harapkan lebih banyak dosen S2 dan S3 yang mendapat alokasi beasiswa dari LPDP. Arah kita memang meningkatkan jumlah dosen S2 dan S3,” kata Nico, panggilan

akrab Junico.

Politisi F-PDI Perjuangan itu juga menyimpulkan, dengan meningkatnya jumlah dosen S2 dan S3 yang mengajar di berbagai perguruan tinggi, dapat meningkatkan akreditasi perguruan tinggi tersebut.

Nico menegaskan, penyaluran beasiswa LPDP harus diprioritaskan pada kebutuhan, seperti mengacu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Anggota Komisi X DPR RI Junico Siabaan

"Ada prioritas diberikan kepada siapa. Sarjana apa yang kita butuhkan, atau pasca sarjana seperti apa. Disertasi, tesis, atau penelitian apa yang kita butuhkan," imbuh politisi asal Dapil Jawa Barat itu.

Sehingga, lanjut Nico, hasil penelitian penerima beasiswa LPDP itu dapat diterapkan dan diaplikasikan sesuai kebutuhan Tanah Air, bukan hanya sekedar mendukung tugas akhir mahasiswa penerima LPDP.

"Lebih baik dipilih mereka (penerima beasiswa, RED) yang melakukan penelitian dan bisa

diterapkan sesuai kebutuhan. Misal kita untuk ketahanan pangan, industri, ataupun pertanian, harus kita dahulukan," saran Nico, sembari menegaskan kepada penerima LPDP yang lulus di perguruan tinggi luar negeri agar kembali dan mengabdikan untuk Bangsa.

Sebelumnya, pihak LPDP menjabarkan dari tahun 2013 hingga 2016, akumulasi penerima LPDP sebanyak 12.534 mahasiswa. Pada tahun 2016 ini, akumulasi mahasiswa *on going* sebanyak 5.087 mahasiswa, sementara akumulasi alumni sebanyak 1.271 mahasiswa. ■

(sf) foto : kemas/br

Biro Perjalanan Yang Berangkatkan Calhaj Lewat Filipina Harus Dicabut Ijinnya

Biro perjalanan penyelenggaraan haji dan umroh yang terlibat pemberangkatan calhaj lewat Filipina harus dicabut ijinnya. Selanjutnya oknum-oknum yang terlibat kasus harus diproses secara hukum sehingga ada efek jera.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim di Jakarta, Rabu (7/9) menanggapi 117 calon haji asal Indonesia yang melakukan pemalsuan paspor dan akhirnya ditahan Pemerintah Philipina. Sebagian telah berhasil dipulangkan ke tanah air dan beberapa orang masih ditahan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menurut politisi F-PPP dari Dapil VIII Jateng ini, hal yang menjadi catatan khusus kasus ini ada unsur pidana yang dilakukan 7 biro perjalanan. Pasalnya setelah di cek ke imigrasi menyatakan visa umroh, lalu berangkat ke Malaysia baru ke Philipina. Muncul masalah karena di Philipina mengubah dari paspor umroh ke paspos haji. Yang lebih memprihatinkan, korban penipuan sudah mengeluarkan dana antara Rp 150-200 juta.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data, biro perjalanan haji dan umroh yang terdaftar sebanyak 651, tapi

yang dapat ijin resmi dan berlaku 3 tahun hanya sekitar 360. "Separa lebih biro perjalanan inilah yang melakukan hal-hal diluar aturan," tegasnya.

Selaku anggota Tim Pengawas Haji Tahap DPR RI, Mustaqim menyatakan ada beberapa hal yang mengiringi WNI berhaji lewat Philipina. Dari kronologis itu terjadi karena panjangnya antrean dan terjadi ledakan, terbukti di Sulawesi daftar tunggunya sampai 39 tahun. Kejadian ini hampir merata ada di Jateng, Jatim terbanyak di Sulsel. Karena warga muslim di Philipina kecil, sehingga kuota tak terpenuhi dan dimanfaatkan oleh biro perjalan haji Indonesia. "Sebelumnya pernah oknum melakukan dan berhasil dan berupaya terus menambah, sekarang ini baru kena batunya," papar dia.

Kepada calhaj Mustaqim berpesan, harus sabar dan sambil menunggu renovasi dan pembangunan Masjidil Haram

akan selesai 2018- 2019 bisa kembali ke kuota normal 212.000, dan kalau ada tambahan bisa 230.000 calhaj.

Di sisi lain, lanjut dia, calon Jemaah haji harus diberi sosialisasi oleh Kemenag dan jajaran yang ada hingga sampai KUA yang memiliki petugas hingga ke pelosok. Harus ada sosialisasi bahwa kondisi beberapa tahun masih seperti sekarang antre sangat panjang. "Calhaj harus tetap mengikuti aturan, bukan berarti tidak bisa haji, tetapi diharapkan dengan selesainya pembangunan Masjidil Haram, maka pada tahun 2018-2019 sudah normal kembali ke kuota 230 ribu," pungkasnya. ■

(mp) foto : Kresna/mtc



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

Azis Syamsudin Usul Libatkan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan PNBP

Anggota Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin mengusulkan kepada Kementerian Keuangan RI, sebagai koordinator pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar membuat platform sistem dalam pengelolaan PNBP. Lebih rinci, dia menjelaskan pengelolaan platform sistem PNBP ini dengan melibatkan pihak ketiga.

Ide yang Azis sampaikan ini bertujuan guna memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. "Sehingga kementerian dan lembaga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih fokus, dan *checks and balances*. Ada pihak yang bisa melakukan *checks and balances*. Dan Menteri Keuangan bisa melakukan itu secara terbuka transparan dan akuntabel sehingga jelas," papar Azis.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah, membahas Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN 2017, di Ruang Rapat Banggar, Senin (5/9).

Azis melanjutkan, pelibatan pihak ketiga ini pasti dengan sistem perekrutan yang ketat. "Dan pihak ketiga itu, tentu dengan sistem yang kita buat bersama secara ketat. Kita tidak bisa pungkiri sekarang ini negara-negara yang lain dalam pengurusan visa pakai *outsourcing*, dengan sistem yang dibangun," jelasnya.



Anggota Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin

Dia pun tidak mengkhawatirkan adanya penyelewengan dalam sistem ini, karena sistem ini menggunakan pelayanan *online* yang sangat minim terjadi manipulasi. Azis juga mengatakan, dalam melibatkan pihak ketiga ada keuntungan untuk pengurangan angka pengangguran, karena telah menyedot tenaga kerja baru.

"Sekarang berapa tenaga kerja yang tersedot dalam kementerian dalam

lembaga untuk mengurus ini. Contoh masalah perhubungan, orang beli tiket tidak perlu antri kok, tinggal *online*. Ngantrinya lewat *online*, tidak secara fisik. Pelayanan online orang tidak bisa manipulasi. Bagaimana mau manipulasi sistem IT komputer, tidak bisa," tandasnya.

menjelaskan usulan ini spiritnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia mengharapkan dalam pembangunan sistem ekonomi harus meningkat dari waktu ke waktu, dengan tidak melupakan evaluasinya secara berkala.

Terlebih lagi secara peraturan dan perundang-undangan hal ini dimungkinkan. "Secara aturan perundang-undangan itu dimungkinkan, kita mengubah dari sistem manual ke sistem *online*. Untuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan masyarakat," jelas Azis. ■

(eko.mp) Foto: jayadi/br



Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufiqulhadi

RUU Pertembakauan Melindungi Petani Lokal

Saat Rapat Paripurna, sebelum laporan Komisi III DPR RI dimulai, ada instruksi yang mewarnai rapat. Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufiqulhadi menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan, menurutnya RUU tersebut memiliki spirit perlindungan terhadap tembakau dan petani lokal.

“ Kami menganggap RUU ini sangat bagus, karena RUU ini punya semangat kedaulatan tembakau. Karena negara kita diserbu oleh tembakau-tembakau asing. Ini adalah

bentuk perlindungan terhadap tembakau itu,” tandas Taufiqulhadi, di ruang Rapat Paripurna Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9).

RUU tersebut mengutamakan pada kesejahteraan petani tembakau. Sekaligus sebagai payung hukum industri rokok

Pemerintah Diminta Perhatikan Potensi Atlet

Olimpiade Rio 2016 telah usai. Perjuangan kontingen atlet-atlet Indonesia menghasilkan satu medali emas dan dua perak. Tentu ini perjuangan yang tak mudah. Tak lama lagi, Indonesia harus berjuang di Sea Games 2017, dan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menyiapkan atlet-atlet sejak dini, dan melihat atlet dan cabang olahraga yang berpotensi menghasilkan emas.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9). Rapat membahas agenda utama RKA-KL 2017 Kemenpora.

"Kita ini kurang memperhatikan potensi atlet muda. Ini yang harus kita siapkan. Atlet yang saat ini telah bertanding, dan mendapat medali itu adalah atlet itu yang tidak akan mungkin ikut lagi dalam *event* internasional di kemudian hari. Kemenpora itu harus memfokuskan terhadap pembinaan atlet-atlet muda, dan atlet-atlet yang punya potensi untuk bisa dikembangkan," tegas Sofyan.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai, Kemenpora terkadang lalai kepada potensi atlet muda, dan hanya fokus pada atlet yang sudah menghasilkan prestasi. Padahal seharusnya pembibitan dan pembinaan atlet itu dilakukan sedini mungkin.

"Jadi pembibitan itu jangan terlambat. Namun kita lihat dulu pembibitan seperti



Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan

apa, karena dengan anggaran yang terbatas, tidak semua cabang olahraga kita ambil. Kita tahu, Indonesia, sejarah sukses atletnya itu di cabor tertentu," imbuh Sofyan.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan di cabor perseorangan seperti bulutangkis, angkat besi, tenis, catur, renang, dan lainnya. Cabor yang melombakan perseorangan, memiliki potensi untuk mendulang emas.

"Harusnya kita menempatkan mereka pada prioritas, baru yang lain. Dengan dana

yang sangat terbatas. Kalau dana banyak, lain ceritanya," tukas Sofyan.

Di satu sisi, politisi asal dapil Sumatera Utara itu mengingatkan Kemenpora untuk serius dalam mempersiapkan *event Asian Games*. Menurutnya, sebagai tuan rumah, Indonesia bukan hanya dituntut sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses prestasi.

"Kita cukup banyak waktu, untuk menggembleng generasi muda yang potensi untuk ikut bertanding. Atau atlet muda berpotensi. Kita harus siapkan mereka sejak awal. Pengalaman di Olimpiade Rio dan Sea Games 2017 mendatang, untuk dijadikan batu loncatan ke Asian Games 2018," tutup Sofyan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Krisna Mukti mengingatkan agar Pemerintah lebih serius dalam menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Menurut politisi F-PKB itu, hal ini juga turut menentukan kesuksesan penyelenggaraan.

"*Opening* dan *closing ceremony* harus disiapkan dengan baik. Sehingga jika perolehan medali tidak sesuai harapan,

namun kita dari sisi penyelenggaraannya dinilai baik. Untuk hal ini, harus dialokasikan anggaran yang memadai, dan disiapkan dengan baik," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya Menpora menjelaskan bahwa anggaran Kemenpora RAPBN 2017 setelah pemotongan menjadi sebesar Rp2,750 triliun, dari semula Rp2,998 triliun, karena ada penyesuaian atau penghematan sebesar Rp248 miliar. ■

nasional agar industri tersebut memiliki aturan serta kebijakan yang pasti yang dijamin dalam undang-undang.

"Dalam konteks ini adalah perlindungan terhadap petani, maka ini harus menjadi perhatian kita. Karena itulah dalam kesempatan ini kami mempertanyakan kepada pimpinan kenapa sampai saat ini tidak dibawa ke Bamus, tidak di bicarakan di Bamus. Tidak dibawa ke paripurna," tanya Taufiqulhadi kepada Pimpinan Sidang Taufik Kuniawan.

Dia mempertanyakan kepada pimpinan sidang tentang mekanisme teknis RUU Pertembakauan yang sampai saat ini belum dibawa ke Bamus, sehingga tidak masuk Rapat Paripurna. "Ini lah yang kami pertanyakan, kenapa, ada persoalan apa dengan RUU ini," tanya Taufiqulhadi.

Menjawab pertanyaan tersebut, Pimpinan Sidang Taufik Kuniawan menjelaskan, bahwa RUU tersebut sudah dibahas di Rapat Pimpinan, dan tidak ada masalah yang berarti. "Kita sudah membahas di Rapim. Akan disesuaikan dengan mekanisme, tidak ada masalah, tidak ada hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, hanya masalah teknis saja," jelasnya.

RUU Pertembakauan juga akan mengatur mengenai penetapan harga tembakau. Di dalamnya juga mengatur tentang penyerapan tembakau nasional, larangan impor, dan juga ketentuan izin 80 persen tembakau nasional.

Hal lain yang diatur adalah soal perluasan lahan guna memenuhi kebutuhan nasional terhadap industri tembakau dan penetapan harga pada sektor pemerintah daerah. Khusus mengenai penetapan harga jual tembakau, RUU Pertembakauan mengatur tentang keharusan untuk melibatkan petani. ■

(eko), foto: rani_tin_parle/br

BURT Tinjau Layanan Jasindo di RS *Provider*

PT. Jasindo yang dipercaya mengadakan jaminan kesehatan bagi 560 Anggota DPR RI dan keluarganya mendapat tinjauan langsung dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Sejauh ini layanan kesehatan dan fasilitasnya di rumah sakit *provider* sangat baik.

Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti mengemukakan bahwa kerja sama Jasindo dengan beberapa rumah sakit *provider* di berbagai daerah cukup baik. Ditemui usai meninjau Semen Padang Hospital (SMH) di Kota Padang, Senin (5/9), Novi mengatakan, BURT berkepentingan meninjau SMH untuk mengetahui sejauh mana layanan kesehatan yang diberikan.

"Kita ingin melihat bagaimana kerja sama, koordinasi, dan sosialisasi yang dilakukan Jasindo dengan rumah sakit *provider*, di antaranya adalah rumah sakit Semen Padang ini," ungkap Novi. Dimintai komentarnya atas layanan dan fasilitas di SMH, Novi menilai,

SMH sangat baik dalam memberi layanan.

SPH tidak saja melayani karyawan Semen Padang, tapi juga masyarakat umum dengan sangat baik. Bahkan, pasien peserta JKN BPJS Kesehatan terlayani dengan sangat memadai. Anggota F-Gerindra ini, juga mengapresiasi manajemen SPH yang mendesain

bangunannya tidak seperti rumah sakit, tapi seperti mall.

"Dengan desain ini pasien diharapkan bisa cepat sembuh dan para pendamping pasien juga tidak sakit. Ada pertokoan, cafe, dan tempat bermain anak, semuanya memberi fasilitas yang nyaman bagi pasien yang datang," puji Novi. ■



Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti

(mb), foto: *husein/hr.*

Komisi III Bentuk Panja Sindikat Narkoba

Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Sindikat Narkoba. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Budi Waseso, di ruang rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Kami berharap Panja Sindikat Narkotika ini bisa mengungkap lebih dalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Tidak sebatas pada sindikatnya saja, melainkan siapapun yang ikut ambil bagian dalam peredaran narkoba, dan semua hal yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika bisa menjadi materi panja," papar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap yang memimpin rapat tersebut.

Panja, lanjut Politisi dari Fraksi PAN ini, juga akan ikut mengawasi proses kerja tim pencari fakta (TPF)



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap

Polri yang mengusut testimony Freddy Budiman yang disampaikan oleh Ketua KontraS, Harris Azhar.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk dukungan atas gerakan perang terhadap Narkoba, Komisi III juga mendukung penambahan anggaran serta tambahan personel bagi BNN. Sebagaimana penjelasan Budi Waseso, BNN saat ini hanya memiliki empat ribu personel. Sementara untuk perang terhadap Narkoba yang jumlahnya sangat banyak itu, jumlah ideal personel BNN itu sekitar 72 ribu orang.

"Kondisi BNN tingkat provinsi jauh lebih menyedihkan, tidak punya kantor, personelnnya hanya 2-3 orang, dan dengan peralatan yang sangat minim. Saya kira jika situasi ini terus dibiarkan, maka kita tidak bisa berharap banyak," pungkasnya. ■

(Ayu), foto: *Arief/hr.*



Anggota Baleg DPR RI menandatangani Draf RUU Jabatan Hakim

Baleg DPR RI Sahkan RUU Jabatan Hakim

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Jabatan Hakim. Sepuluh Fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna untuk disetujui dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

“Nantinya, RUU ini menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang jelas bagi Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan harkat dan martabatnya,” ungkap Ketua Panja RUU Jabatan Hakim Supratman Andi Agtas (F-Gerindra) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Dalam Rapat Pleno Baleg yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura), dikemukakan ada 3 hal penting yang diatur dalam RUU tersebut, antara lain: mengatur kedudukan hakim dan hakim ad hoc sebagai pejabat negara yang berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seperti diketahui, belum ada Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai jabatan hakim sehingga jenjang karir, hak keuangan dan fasilitas masih menggunakan standar pegawai negeri sipil.

Kedua, RUU ini mengatur manajemen jabatan hakim mulai dari mekanisme rekrutmen, pembinaan, mutasi dan promosi

hakim, hingga masa pensiun. “Aspek teknis, mulai dari demosi, promosi, pelaksanaan gaji tunjangan dan sebagainya, semuanya kita atur,” ujar Supratman.

Selain itu, diatur juga mengenai keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama. Diharapkan melalui RUU yang diusulkan oleh Komisi III tersebut, dapat menjadi payung hukum dalam menjawab semua pelaksanaan fungsi hakim yang masih banyak menghadapi permasalahan.

Setelah pembacaan persetujuan fraksi yang tertuang dalam pandangan mini fraksi, Rapat Pleno tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan pengambilan keputusan RUU Jabatan Hakim untuk pembahasannya dibawa ke tingkat selanjutnya.

“Kami berharap RUU ini segera diproses dan mudah-mudahan dalam Paripurna pekan ini segera dibacakan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan. ■

(ann.mip/foto.gdi/mr)

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyerahkan laporan hasil uji kelayakan calon Kepala BIN yang terpilih secara aklamasi kepada Pimpinan DPR RI, Kamis (8/9) Foto : Tim Parle

Suasana pagelaran wayang golek memperingati HUT DPR RI ke - 71 dengan dalang Dadan Sunandar Sunarya dan Wawan Deden Among, Sabtu (3/9) Foto : Tim Parle



Dalam rangka rencana penempatan dan penambahan Rak Display Majalah dan Buletin Parlemenaria, Bagian Penerbitan melaksanakan kunjungan ke Terminal Penumpang Tanjung Priok sekaligus menaiki KM. TIDAR tujuan Fak-Fak, Papua Barat untuk melihat potensi baca penumpang kapal (7/9) Foto : Tim Penerbitan



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menandatangani hasil Rapat Kerja dengan Menteri LHK terkait pembahasan anggaran RKA-K/L tahun 2017, Kamis, (8/9). Foto: Andri